Kepentingan Nicolas Sarkozy Dalam Pembuatan Kebijakan Imigrasi di Perancis (*Nicolas Sarkozy's Interest in Immigration Policy Making in France*)

Fudzcha Putri Jazilah.MM, Djoko Susilo, Linda Dwi Eriyanti
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: DPU@unej.ac.id

Abstract

Waves of immigration in France is an important aspect of contemporary French history . At first, the immigrants who came were originally from neighboring countries within Europe, but they also came from countries in Africa and Asia which most are former French colony before World War II. Immigrants from Africa, especially North Africa have *their own problems in France because they have very different backgrounds with the native French. The differences are based on economic background, religion and physical appearance. Those differences become a problem for the French because it is so difficult to blend the differences and make an assimilation. In the end, conflicts began to occur between the immigrants and the native . The largest conflict in 2005 was one of the evidence which show that there was a misunderstanding between the immigrants and the natives. On that matter, Nicolas Sarkozy as the domestic minister initiated a policy namely France Immigration and Integration Law which aim to sort out immigrants who deserve to enter the territory of France. However, what is interesting is that the personal interest Nicolas Sarkozy brought in the policy making which is his desire to raise support for his party and himself when he run for presidential election of France in 2007. Thus, the writer use the Rational Choice Theory to analyze more deeply the related problem . Rational Choice Theory assumes that political actors will only take actions when rational considerations has been made,along with the consideration of cost and benefit whether what he will get equivalent sacrifice his expectation in a established incentive political structure.*

Keywords *: Immigration , political actors, Rational Choice , Self- Interest.*

Pendahuluan

Perancis merupakan salah satu Negara di kawasan Eropa Barat yang menerima banyak imigran, khususnya imigran yang berasal Afrika Utara seperti Aljazair, Tunisia dan Maroko. Pada tahun 2005 Menurut Institut National d'Etudes Demographiques jumlah imigran asal Afrika Utara tersebut mencapai 1.516.000 juta jiwa. Keberadaan imigran asal Afrika Utara dalam jumlah yang besar tersebut menjadi permasalahan tersendiri di Perancis. Karena imigran yang datang tersebut, memiliki latar belakang yang berbeda dengan orang asli Perancis. Negara Perancis ingin di konstruksi sebagai Negara yang maju, Putih dan kristen sedangkan imigran yang datang adalah imigran-imigran dengan latar belakang Muslim, hitam dan miskin.

Perbedaan yang cukup mencolok tersebut memunculkan pengkotak-kotakan masyarakat. Ada yang menerima dan menolak terhadap keberadaan imigran asal Afrika Utara tersebut. Sehingga, asimilasi (pembauran) antara imigran dan warga asli Perancis susah untuk di lakukan. Pada akhirnya, muncul banyak konflik yang di latarbelakangi kecemburuan secara sosial maupun ekonomi. Pada November 2005 terjadi sebuah kerusuhan yang cukup besar sepanjang sejarah imigrasi Perancis. Kerusuhan tersebut disebabkan oleh warga imigran yang tidak puas dengan nasibnya. Kerusuhan tersebut pada awalnya terjadi di pinggiran kota Perancis dan meluas sampai ke pusat kota. Kerusuhan tersebut menelan banyak korban jiwa, kerugiaan materi mencapai 200.000 Euro dan banyak fasilitas umum yang rusak akibat kerusuhan tersebut.

Sebagai bentuk respon dari permasalahan yang muncul tersebut, pada Maret 2006, Menteri Dalam Negeri Perancis Nicolas Sarkozy berinisiasi untuk membuat sebuah skema kebijakan baru terkait imigrasi. Nicolas Sarkozy menyebut tujuan dari skema kebijakan tersebut sebagai "*selected Immigration policy*". Skema kebijakan keimigrasian baru tersebut di kenal dengan Kebijakan *France Immigration and Integration Law.* Skema kebijakan ini dibuat untuk memilah imgran yang hanya memiliki "*high qualified*" yang dapat masuk ke Perancis. Nicolas Sarkozy mengatakan bahwa:

> *In no way must this selected immigration policy result in a brain drain from the countries of origin. Those whom we will welcome will have to give back to their country of origin, in some from or other, the benefits of the training and professional experience they will gain in France. We will take into account the needs of the country of origin when delivering residency permits. This is a major difference from the policies of some of our partners.*

Melalui Skema kebijakan baru tersebut kemudian pada Mei 2006 Pemerintah Mulai mengadposi kebijakan tersebut untuk menjadi Undang-Undang. Melalui Skema Kebijakan Menteri Dalam Negeri Perancis pada saat itu yaitu Nicolaz

Sarkozy Undang-Undang *French Immigration and Integration Law* tersebut kemudian di berlakukan pada 25 Juli 2006 setelah melalui serangkaian proses pembuatan. Seperti Skema yang di ajukan oleh Nicolas Sarkozy Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memilah imigran yang pantas masuk ke wilayah Perancis. Undang-Undang ini dikenal sebagai '*Sarkozy Law 2'* karena sebelumnya pada 26 November 2003 Pemerintah Perancis telah mencoba menggagas hal serupa dengan penamaan *immigration and asylum* yang kemudian dikenal dengan Sarkozy Law.

Pada awalnya kebijakan baru terkait imigrasi yang diinisiasi oleh Nicolas Sarkozy sebagai sebuah kebijakan yang ditujuan untuk menjaga *National Security* negaranya. Namun, jika di analisa lebih dalam ada hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan pribadi Nicoalas Sarkozy di dalamnya. Kepentingan ini tercermin dari kekuasaan dan suara yang di dapat oleh Nicolas Sarkozy saat pengesahan kebijakan tersebut menjadi UU.

Ketika kita melihat dalam konteks kebijakan suatu negara merupakan kebijakan yang sarat akan kepentingan dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Apa yang menjadi kepentingan nasional kemudian akan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh seorang aktor politik. Hal ini tentu saja tetap berlaku dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah Perancis yang dalam kasus ini membahas perihal imigran.

Kemudian sebagai seorang aktor politik Nicolas Sarkozy juga mempertimbangkan keuntungan yang akan di dapat dengan membuat kebijakan tersebut salah satunya adalah citra dirinya sebagai politisi semakin dikenal. Hal lain yang kemudian menjadi sangat penting adalah pada tahun 2007 Nicolas Sarkozy mencalonkan dirinya sebagai Presiden perancis dan melalui isu imigran dan keberhasilannya membuat kebijakan yang restriktif tersebut mempermudah jalannya menjadi pemimpin nomor satu di Perancis.

Keterkaitan antara kepentingan pribadi seorang aktor politik seperti Nicolas Sarkozy dan kebijakan yang dibuatnya dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 akibat kerusuhan tersebut dukungan atau simpati warga Perancis menurun pada Partai yang menaungi Nicolas Sarkozy yang pada masa itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Pada tahun 2005, dukungan rakyat Perancis terhadap partai pemerintah yaitu UMP, menunjukkan penurunan, dan sebaliknya dukungan terhadap Partai Sosialis semakin meningkat. Penurunan dukungan rakyat Perancis kepada pemerintah tersebut di dasari atas kekecewaan rakyat terhadap kegagalan Pemerintah mengatasi masalah-masalah sosial-ekonomi Perancis yang sebagaian besar diakibatkan oleh kedatangan imigran.

Keterkaitan antara kepentingan dan kebijakan yang dibuat oleh seorang aktor politik juga dapat terlihat pada bagaimana kelompok haluan kanan yang cenderung menggunakan migrasi (baik legal maupun illegal) sebagai isu politk. Dimana kemunculan kelompok yang menentang masuknya imigran ke daratan eropa khususnya Perancis mulai menunjukkan gejala peningkatan. Beberapa politisi tanpa malu menjadikan isu menentang gelombang imigrasi sebagai jargon dan agenda perjuangan politik mereka sebagaimana yang di lakukan oleh sarkozy dalam pembuatan kebijakan *France Immigration and Integration Law*.

Berdasarkan beberapa hal tersebut menjadi menarik untuk di analisa lebih dalam tentang apa sebenarnya yang melatarbelakangi Nicolas Sarkozy selaku Menteri Dalam Negeri membuat sebuah kebijkan keimigrasian baru yang akhirnya di sahkan menjadi UU *France Immigration and Integration Law*. Sehingga penulis menentukan rumusan masalah Mengapa Nicolas Sarkozy berinisiasi membuat kebijakan imigrasi baru yang dikenal dengan *France Immigration and Integration Law*. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memahami mengapa Nicolas Sarkozy berinisiasi membuat kebijakan *France Immigration and Integration Law*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui lebih jauh alasan mengapa Nicolas Sarkozy selaku Menteri dalam negeri membuat kebijakan tersebut.

Kerangka Teori

Untuk menganalisa sebuah permasalahan dan memprediksi sebuah fenomena hubungan internasional, penulis membutuhkan sebuah alat analisa yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Alat analisa tersebut dapat berupa sebuah teori maupun konsep, yang berfungsi sebagai pisau analisa dalam menemukan jawaban dari sebuah permasalahan. Menurut Mohtar Mas'oed (1990: 219), teori diartikan sebagai suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan "mengapa"; artinya berteori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi. Teori yang baik adalah basis bagi pengembangan pengetahuan yang layak dipercaya dan berdasarkan kenyataan.

Sejalan dengan hal tersebut MsCain dan Segal (1937:99) mendefinisikan teori secara spesifik sebagai berikut:

> "serangkaian *statment* yang saling berkaitan…(yang terdiri dari) : 1. Kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep-konsep dasar teori itu; 2. Kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu sama lain; dan 3. Kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statemen teoritis itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empiris (yaitu hipotesa)"

Untuk itu penulis menggunakan Kerangka ***Rational Choice Theory (Teori Pilihan Rasional)*** sebagai alat analisa dalam menemukan jawaban dari permasalah yang telah ditentukan. Teori pilihan rasional pada dasarnya merupakan kristalisasi dari pemahaman perkembangan aliran pemikiran dari paham rasionalitas Eropa Barat, yaitu paham teori yang muncul pada abad pertengahan, sebagai antitesis atas pemikiran paham naturalis. Pilihan rasional sebagai model penjelasan dari tindakan-tindakan manusia, dimaksudkan untuk memberikan analisa formal dari pengambilan keputusan rasional berdasarkan sejumlah kepercayaan serta tujuan.

Teori pilihan rasional sebagai sebuah pendekatan digunakan untuk memahami bagaimana elite politik menentukan kebijakan-kebijakan politik berdasarkan pertimbangan pilihan-pilihan rasional. Pilihan rasional merujuk pada perilaku manusia sebagai mahkluk ekonomi, yang bertindak karena ada motivasi insentif. Teori ini

menempatkan manusia sebagai mahkluk rasional. Manusia rasional akan selalu dapat membuat peringkat pilihan sehingga dengan cara itu dapat diperbandingkan kelebihan dan kekurangannya. Meskipun peringkat pilihannya tersebut dapat berubah, tetapi ia selalu memilih alternative yang peringkatnya tertinggi dari rangkaian pilihannya itu dan selalu membuat pilihan yang sama setiap kali dihadapkan pada alternative yang sama. Rasionalitas merujuk pada proses tindakan, bukan pada hasil akhir atau bahkan keberhasilan dalam mencapai suatu keinginan.

Dalam Bukunya Linklater yang digagas oleh Duncin Snidal teori pilihan rasional memiliki tiga asumsi dasar yaitu pertama, aktor baik individu maupun negara diasumsikan bergerak secara rasional dengan *self Interest*. Kedua, kepentingan tiap aktor bersifat eksogen dimana kepentingan itu telah ada sebelum aktor memutuskan untuk masuk ke dalam suatu hubungan sosial. Ketiga, Masyarakat adalah area pertemuan strategi para aktor yang berusaha memaksimalkan kepentingannya.

Asumsi dasar tersebut merupakan sebuah penyederhanaan tentang keputusan individu mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan dari pembuat keputusan yang diambil. Individu pengambil keputusan tidak hanya memiliki nilai dan keyakinan yang berbeda, tetapi juga memiliki kepribadian unik, pengalaman pribadi, kemampuan intelektual, dan gaya dalam membuat keputusan.

Dalam konteks pilihan rasional, setiap kebijakan dan pilihan elit politik dalam pemerintahan, sangat dipengaruhi pula oleh motif-motif mencari keuntungan dan kemanfaatan diri si pelaku (elite politik), yang tidak jarang bersebrangan dengan nilai-nilai reformis demokrasi. Terjadinya tumpang tindih antara motif kepentingan pribadi dan tekanan menjalankan misi politik reformasi, disebut tepat oleh Geddes (1994:8) sebagai "dilemma politisi". Elite dalam pemerintahan tidak terlepas dari dilemma semacam ini. Geddes menyatakan bahwa perilaku bernegara sebagai hasil akhir dari pilihan rasional yang dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kepentingan-kepentingan pribadi, yang bertindak dalam kerangka institusi tertentu dan dalam konteks yang nyata.

Selaras dengan hal tersebut Juhn Turnr (2002:456) melengkapi dengan menyatakan bahwa apabila direfleksikan pada sosok politisi, maka ia hanya bersikap dan bertindak apabila benar-benar telah didahului dengan pertimbangan yang rasional, terkait dengan apakah yang akan ia korbankan, sebanding atau tidak dengan yang akan ia peroleh di dalam sebuah struktur kepolitikan yang telah mapan struktur insentifnya. Politisi dalam pengambilan kebijakan selalu bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan kalkulasi biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh.

Penekanan pada agen juga tidak serta merta pendekatan *rational choice* mengabaikan variabel sosial atau kolektif yang membatasi pilihan-pilihan individu. Secara implisit maupun eksplisit banyak para pengusut teori ini yang mengakui bahwa sesungguhnya individu-individu ini bertindak secara rasional ketika mereka dirangsang oleh stimulus tertentu, dan pilihan-pilihan mereka juga terbatas.

Teori Pilihan Rasional kemudian menjadi alat analisa yang relevan untuk menjelaskan dinamika perilaku aktor politik sebagaimana yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Bahwa dalam mencetuskan sikap dan kebijakan politik, para aktor senantiasa terkait dengan aspek-aspek rasionalitas politik. Dalam hal ini aktor politik yang menjadi pembuat kebijakan atau *Decision Maker* adalah Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy mempertimbangkan aspek-aspek rasional yang muncul sebagai sebuah pertimbangan mengapa dirinya harus membuat suatu kebijakan.

Dalam konteks pembuatan kebijakan *France Immigration and Integration Law*, Nicolas Sarkozy membuat kebijakan tersebut atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dibuat oleh Nicolas Sarkozy sebagai aktor politik utuk dapat mencapai tujuannya baik itu tujuan pribadi dirinya maupun tujuan negara secara luas. Nicolas Sarkozy juga merupakan aktor politik yang memiliki keunikan di mana dia merupakan seorang keturunan imigran Hungaria yahudi dari garis Ayah namun, pada faktanya Sarkozy dapat membuat suatu kebijakan yang cukup restriktif dalam menangani imigran yang ada di dalam negaranya. Hal tersebut terkait dengan kepentingan Nicolas Sarkozy untuk dapat melanggengkan kekuasaannya yang pada 2007 dirinya mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di Perancis.

Metode Penelitian

Salah satu hal yang juga menjadi penting dalam penulisan suatu karya ilmiah adalah keberadaan metode penelitian. Metode penelitian digunakan untuk membantu penulis untuk menganalisa dan menjawab suatu permasalahan. Metode penelitian sendiri dibagi kedalam dua bagian, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis lebih condong untuk menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan berbagai macam literatur yang dapat menunjang jalannya penulisan. Sehingga dalam hal ini penulis menggunakan sumber data sekunder di mana penulis tidak turun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian.

Sehingga, untuk mendapatkan data yang valid dan mencukupi, penulis menggunakan beberapa pusat informasi seperti Perpustakaan pusat Universitas Jember, Ruang Baca FISIP Universitas Jember, Buku Koleksi Pribadi, Artikel, majalah, jurnal ilmiah dan Media internet

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen, buku, jurnal dan surat kabar, maka analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dengan menggambarkan fakta-fakta dan memberikan data yang akurat dan tepat. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh Sarkozy dalam Kebijakan Imigrasi di Perancis.

Hasil dan Pembahasan

Perancis, atau dalam bahasa Perancis disebut *République française*, merupakan sebuah negara yang teritori metropolitannya terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Perancis Metropolitan memanjang dari Laut Mediterania hingga Selat Inggris dan Laut Utara, dan dari Rhine ke Samudera Atlantik. Secara geografis Perancis berbatasan dengan Belgia, Luksemburg, Jerman, Swiss, Italia, Monako, Andorra, dan Spanyol. Karena memiliki departemen seberang laut, Perancis juga berbagi perbatasan tanah dengan Brasil dan Suriname (berbatasan dengan Guyana Perancis), dan Sint Maarten (berbatasan dengan Saint-Martin). Perancis juga terhubung dengan Britania Raya oleh Terowongan Channel, yang berada di bawah Selat Inggris.

Perancis merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk sekitar 62 juta jiwa. Perancis terkenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah imigran dari berbagai negara *francophone*. Negara yang termasuk dalam negara *francophone* adalah negara bekas jajahan Perancis, seperti di negara-negara kawasan Afrika. Dengan jumlah penduduk sekitar 62 juta jiwa, sebagian besar penduduk Perancis adalah imigran yang berasal dari Afrika, Asia, dan Eropa lainnya.

Agama Katolik merupakan agama mayoritas dengan jumlah penganut sebesar 64 persen atau 40 juta jiwa, kemudian agama Islam menjadi golongan minoritas dengan jumlah terbesar di Perancis dengan perkiraan jumlah muslim sebesar 5 juta jiwa atau sekitar 8 – 9 persen dari jumlah penduduk Perancis. Keberadaan jumlah muslim ini cukup besar jika dibandingkan dengan minoritas lainnya yaitu penganut Kristen Protestan sekitar 800 ribu jiwa, Yahudi sekitar 600 ribu jiwa, dan Buddha sekitar 150 ribu hingga 500 ribu jiwa. Populasi muslim di Perancis sebagian besar berasal dari para imigran negara-negara Afrika Utara seperti Aljazair, Maroko dan Tunisia. Para imigran ini kemudian pindah, menetap dan mendapatkan kewarganegaraan Perancis.

Perancis sebagai negara yang menerima imigran ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang sehingga menjadikan Perancis sebagai negara tujuan para imigran yang datang khususnya dari wilayah bekas jajahannya yaitu wilayah Afrika Utara. Padahal jika ditelusuri lebih dalam negara kolonialis yang memiliki wilayah koloni di Afrika tidak hanya Perancis. Ada negara-negara lain di kawasan Eropa yang juga melakukan penjajahan di wilayah Afrika.

Menurut Mosley dan Willian (2009) Afrika pada masa Imperialisme Barat tersebut, diumpamakan sebagai buah yang ranum, yang diperebutkan oleh banyak negara di Eropa. Masih diumpamakan sebagai buah ranum, negara-negara yang cepat bergerak akan mendapatkan bagian yang lebih banyak dan lebih manis, seperti apa yang dilakukan oleh Perancis dan Inggris Raya. Sedangkan Spanyol dan Italia hanya mendapatkan bagian yang kecil dan terkadang tidak berarti apa-apa. Hal tersebut lebih sering dikenal sebagai *Scramble for Africa* (Perebutan Afrika). Selain mendapatkan bagian yang lebih besar, negara-negara seperti Perancis dan Inggris Raya banyak meninggalkan warisan kolonialisme, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya.

Suatu hal yang sangat menarik kemudian bahwa apa yang dilakukan Perancis saat menajajah sehingga menjadikan negara bekas jajahannya pada akhirnya lebih memilih Perancis sebagai negara tujuan mereka. Secara Historis, fenomena gelombang imigrasi di Perancis dipengaruhi oleh warisan kolonialisme pada abad-abad sebelumnya serta sebuah perjalanan tradisi panjang tentang bagaimana Perancis mencari tenaga kerja. Secara keseluruhan, telah terjadi peningkatan yang stabil dalam imigrasi selama abad terakhir, dan ini telah memiliki dampak yang kuat pada sifat masyarakat Perancis.

Keberadaan imigran di Perancis dalam jumlah yang besar khususnya yang berasal dari afrika utara membawa dampak yang juga cukup signifikan pada kebijakan yang dibuat oleh pemeritah. Bahkan, tidak hanya masyarakat yang melakukan pengkotak-kotakan respon terhadap imigran tetapi pemerintah juga melakukan hal yang sama. Hal ini terbukti pada masa pemerintahan dari partai sayap kiri yang merupakan partai berhaluan sosialis dengan Perdana Menteri Lionel Jospin (*Parti Socialiste*) banyak peraturan yang membatasi para imigran dirubah menjadi semakin lunak. Misalnya saja, status imigrasi khusus diciptakan untuk karyawan berkualifikasi tinggi, ilmuwan dan seniman. Kemudian Pada tahun 1997 program legalisasi disusun untuk orang asing yang tinggal di negara itu tanpa izin. Kemudian sejak pergantian pemerintahan pada tahun 2002 yang di pegang oleh sayap kanan atau konservatif, kembali beralih ke kebijakan imigrasi yang lebih ketat.

Negara mengklaim otoritas absolut untuk memutuskan siapa yang pantas untuk masuk dan meninggalkan wilayah juridiksinya. Untuk jangka panjang, dampak yang paling terlihat dari imigrasi internasional adalah terciptanya etnis minoritas di negara-negara tujuan yang akan mempengaruhi stabilitas sosial dan politik dalam negeri serta kesejahteraan ekonomi negara tujuan imigrasi.

Kebijakan imigrasi Perancis sejak tahun 2002 telah sebagian besar didorong oleh Nicolas sarkozy, sebagai menteri dalam negeri, pemimpin UMP sayap kanan dan pada tahun 2007 menjadi presiden Republik. Wacana dan tindakan kontrol keimigrasian dan integrasi yang dimunculkan oleh Nicolas Sarkozy telah menyimpang dalam hal-hal yang signifikan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya dalam penanganan masalah ini di mana pada masa-masa tersebut dipimpin oleh partai sayap kiri. Kontribusi ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana dan mengapa Sarkozy telah mengubah ketentuan debat imigrasi di Perancis dengan memeriksa cara di mana kebijakan telah berkembang dan dengan mengidentifikasi kekuatan pendorong perilaku dan sikap dari kanan di Perancis. Sehingga dapat dilihat bahwa persepsi yang muncul dari diri Nicolas sarkozy tersebut sebagian besar merupakan pertimbangan partai politik yang menjadi tempat Sarkozy mengeksplorasi tindakan politiknya. Kehidupannya dalam partai sayap kanan ini telah menjadi faktor utama dalam strategi dan kebijakan sarkozy yang anti imigran.

Dalam hal ini Nicolas sarkozy merupakan politikus yang memiliki eksistensi yang sangat tinggi. Kinerjanya yang sangat baik dan rakyat Perancis mengenalnya sebagai

tokoh pembaharuan. Dalam pemerintahan Jaques Chirac, Sarkozy memegang jabatan-jabatan penting. Walaupun berasal dari partai yang sama dengan Chirac namun pemikiran Sarkozy tidak selalu sama. Sarkozy cenderung kontra dengan kebijakan Chirac yang dinilainya kurang efektif mengatasi masalah Perancis khususnya masalah imigran. Dalam kampanyenya, ia berusaha meyakinkan rakyat Perancis agar memilihnya dengan memberikan kebijakan yang lebih efektif untuk mangatasi masalah-masalah yang dihadapi Perancis.

Hal yang sangat paradoksal dalam kebijakan sarkozy kemudian adalah membatasi atau melarang sama sekali imigran yang akan masuk ke Perancis, bagaimana bisa seorang keturunan imigran hungaria dan yahudi melaksanakan politik anti imigran sedangkan dia sendiri adalah seorang imigran. Tetapi itulah demokrasi yang terjadi di Perancis. Namun, perjalanan pengalaman hidup yang di lalui oleh Nicolas Sarkozy membawanya pada titik dimana setiap tindakan yang diambil adalah sebuah tindakan yang merepresentasikan partai dan kepentingannya. Dalam struktur pemerintahan Sarkozy cukup eksis dimana dia selalu menempati posisi-posisi yang cukup strategis diantaranya menjadi Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Kemudian, setelah bertahun-tahun melalui perdebatan Menteri dalam negeri Perancis Nicolas Sarkozy, yang pada 2007 berhasil mengungguli saingannya dan menjadi Presiden Perancis. Berhasil mengadopsi sebuah hukum dimana pemerintah dapat mengendalikan imigrasi. Sarkozy berpendapat bahwa " *imigrasi selektif ... adalah ekspresi kedaulatan Perancis. Ini adalah hak negara kita, seperti semua negara-negara demokrasi besar dunia, untuk memilih orang asing memungkinkan untuk berada di wilayah kita*".

Kebijakan yang dimulai dengan pembuatan Rancangan itu menawarkan izin tinggal untuk pendatang yang mempunyai keahlian tinggi dari luar Uni Eropa. Menteri Dalam Negeri Nicolas Sarkozy, yang merancang RUU itu, mengatakan aturan baru ini akan membuat Perancis setara dengan negara lain. Para wakil di Dewan Nasional menyetujui RUU imigrasi dengan 367 suara lawan 164 suara. Selanjutnya RUU itu juga harus disetujui Senat. Menteri dalam negeri Nicolas Sarkozy mengatakan kerusuhan yang dilakukan sejumlah anak muda diwilayah hunian imigran pinggiran kota Perancis November 2005 menunjukkan kegagalan sistem imigrasi dan integrasi. Sarkozy mengatakan Perancis, seperti juga sejumlah negara barat lain, harus memeilih imigran yang dibutuhkannya atau yang dikenal dengan istilah "Selected Immigration Policy" . Hal tersebut menjadi suatu kekuatan partai UMP karena memiliki kursi 313 dari total 577 kursi di Majelis Nasional dan 151 kursi dari total 373 kursi di Senat.

Berdasarkan kebijakan baru tersebut, akan lebih mudah bagi para pekerja asing untuk memasuki negara itu dan mengambil pekerjaan dalam mengisi kekurangan tenaga kerja. Hal ini berlaku baik untuk pekerjaan terampil dan posisi yang membutuhkan pekerja dengan kemampuan yang baik. Baru setelah tinggal selama tiga tahun pendatang dengan keterampilan dan bakat tersebut mendapat ijin tinggal. Hal tersebut dimaksudkan untuk membuat lebih mudah bagi orang yang memiliki kualifikasi tinggi dan yang dianggap " mampu mengembangkan citra baik Perancis " untuk dapat tinggal di negara tersebut. Menteri Dalam Negeri Perancis pada saat itu, Nicolas Sarkozy (UMP), mengatakan bahwa "*in this regard that he wanted to bring "the best" into the country and not those who are not wanted anywhere else*".

Dalam hal reunifikasi keluarga, undang-undang baru ini lebih berorientasi kuat pada Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Di atur bahwa Periode minimum tinggal sebelum seorang imigran dapat mengajukan permohonan untuk reunifikasi keluarga adalah satu tahun hingga 18 bulan. Selain itu, pada waktu berikutnya pemohon harus dapat membuktikan penghasilan yang diterima rutin setara dengan kebijakan upah minimum secara umum (salaire minimal de croissance, SMIC).

Kemudian jika kita kaitkan antara kepentingan Sarkozy dan kebijakan yang dibuatnya maka muncul sebuah fakta bahwa yang dilakukan Nicolas Sarkozy membuat kebijakan tersebut membawa *self interest* dirinya yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden Perancis pada 2007. Fakta bahwa dukungan terhadap partainya berkurang pasca kerusuhan 2005 dan masalah-masalah terkait imigran yang tidak dapat di selesaikan oleh pemerintah Jaques Chiraq membawa Nicolas Sarkozy memberanikan diri membawa isu imigran sebagai isu yang dapat menaikkan simpati dan dukungan masyarakat terhadap partainya dan dirinya.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Anthony Downs (1995:174)"*pemilih (konstituen) akan menggunakan berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kandidat yang diinginkan oleh mereka terhadap pemerintah dan pilihannya tersebut sangat didasarkan dengan kepentingan mereka sesuai dengan posisinya dalam masyarakat"*.

Kebijakan yang muncul kemudian semata-mata merupakan hasil kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam tujuan jangka pendek partai, yaitu memenangkan pemilu. Pemilih adalah rasional, akan tetapi memiliki sedikit informasi mengenai hubungan antara pilihannya dan kebijakan yang diusulkan oleh yang lain. Pilihannya, yaitu memilih kandidat yang memiliki program kebijakan paling sesuai dengan kepentingan mereka.

Dalam debat maupun kampanye, Nicolas Sarkozy lebih memfokuskan masalah dalam negeri terutama masalah imigrasi yang menjadi faktor utama menurunnya perekonomian Perancis. Dalam usahanya untuk memperoleh suara terbanyak, Nicolas Sarkozy menawarkan program-program kebijakan yang sangat solutif untuk mengatasi permasalahan dalam negeri Perancis tersebut, baik untuk rakyat Perancis itu sendiri maupun untuk para imigran. Dalam upaya memperoleh suara terbanyak dan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai partai pemerintah yang berkuasa sejak tahun 1995, Partai Union for a Popular Movement (UMP) berusaha mengeluarkan program-program kebijakan partai yang cenderung mendapat dukungan penuh dari rakyat Perancis. Salah satu bentuk kebijakan yang sudah di buat Nicolas Sarkozy pada saat menjabat menteri dalam negeri adalah *france Immigration and Integration Law.* Kebijakan tersebut membuahkan hasil dengan di deportasinya 13.000 imigran setelah kebijakan yang di inisiasi oleh Nicolas Sarkozy tersebut di terapkan.

Kemudian setelah melakukan pemilu pada tahap pertama pada tanggal 22 April 2007, Dewan Konstitusi mengumumkan secara resmi hasil pemilihan. Hasilnya terpilihlah dua kandidat terkuat calon Presiden Perancis yaitu Nicolas Sarkozy dan Segolene Royal. Mereka merupakan calon presiden Perancis yang memiliki pendukung yang sangat banyak. Pada pemilu putaran pertama, Sarkozy meraih suara sebanyak 31,18% (11,448,663 suara) dan Segolene Royal meraih suara sebanyak 25,87% (9,500,112 suara). Pemilu putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2007 merupakan pemilu Perancis yang sangat mendebarkan. Masing-masing pendukung Sarkozy dan Royal berharap idolanya berhasil menjadi Presiden Perancis untuk 5 tahun yang akan datang. Namun setelah melakukan pemilu putaran kedua tersebut, Royal ternyata harus mengakui kekalahannya atas Sarkozy yang menang dengan perolehan suara sebanyak 53,06% (18.983.408 suara). Royal sendiri memperoleh suara 46,94% (16.790.611 suara). Kemenangan mutlak itu akhirnya memutuskan bahwa Nicolas Sarkozy tampil sebagai Presiden baru Perancis menggantikan Jacques Chirac, seorang tokoh konservatif Perancis yang sudah berkuasa selama 12 tahun.

Hasil yang diperoleh pada pemilu 2007 tersebut tidak terlepas dari usaha Nicolas Sarkozy selaku aktor politik. Nicolas sarkozy berusaha menjadikan imigran sebagai isu utama dalam kampanye yang dilakukannya serta kebijakan *france immigration and integration law* yang dibuatnya pada tahun 2006 menjadikan kepentingan pribadi dari Nicolas Sarkozy untuk menjadi Presiden Perancis terwujud.

Kesimpulan

Secara rasional seorang aktor politik tidak akan membuat suatu kebijakan apabila kebijakan tersebut tidak membawa dampak yang cukup signifikan pada dirinya. Kebijakan yang dibuat oleh seorang aktor politikpun menjadi sarat akan kepentingan. Nicolas Sarkozy sebagai seorang politisi yang cukup eksis dan controversial dikalangan politisi eropa dan perancis khususnya mampu membuat sebuah kebijakan yang cukup restriktif terhadap imigran. Padahal, jika dilihat secara historis Nicolas Sarkozy merupakan aktor politik yang memiliki darah imigran dari ayahnya yang berkebangsaan Hungaria Yahudi. Namun, kehidupan dan pengalaman politiknya menjadikan Nicolas Sarkozy menjadi sosok politisi yang berani membuat kebijakan yang bahkan bertolak belakang dengan sejarah hidupnya.

Kebijakan keimigrasian baru yang di buat oleh Nicolas Sarkozy secara sederhana dapat dimaknai sebagai usaha Nicolas Sarkozy untuk mencapai *National Security* negaranya. Namun, jika di analisa lebih dalam lagi makan ada *self Interest* yang juga dibawa oleh Nicolas Sarkozy dalam pembuatan Kebijakan tersebut yaitu meningkatkan dukungan masyarakat terhadap partainya dan menaikkan simpati Masyarakat perancis kepada dirinya yang mencalonkan diri sebagai presiden Perancis pada tahun 2007.

Daftar Pustaka

Buku

Barbara Geddes. 1994. *Politician's Dillema, Building state capacity in Latin America*. university of California Press: Barkley.

Brian White, Richard Little dan Michael Smith. 2001. Issues in World Politics. Oxford University Press.

Juhn Turnr. 2002. *The Policy Process*. Routledge: London.

Mas'oed,Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. LP3ES: Jakarta.

McCain, Garvin dan Erwin Segal. 1937. *The game of science*. Brooke: cole.

Moseley, William G. 2009. *Taking Sides: Clashing Views in African Issues*. Third Edition. McGraw Hill : New York.

Slomp, Hans. 2011. *Europe A Political Profile ; An american companion to european politics*". Santa Barbara : California.

Vit Hlousek and Lumbomir kopecek. 2010. *Origin Ideology and Transformation of political parties: East Central and Western Europe compared*. Asgate publishing company : USA.

Jurnal

Mark P. Petracca. 1991. *The Rational choice Aproach to Politics: A Challenge to Democratic Theory*. Spring Vol.53, No. 2. Cambridge University Press.

F.C Susila Aditya. 2008. "*Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)"*. MMH Vol. 37, No.2Universitas Diponegoro : Semarang.

Meng-Hsuan chou and Nicolas Baygert. 2007. *The 2006 French Immigration and Integration Law: Europeanisation or Nicolas Sarkozy's Presidential Keystone?*. Working Paper. No. 45. University of Oxford.

Demetrios G. Papademitriou. 1998. *Migration*. Winter Jurnal Foreign Policy. No. 109.

Linklater, Andrew. Rational in handbook of International Relations, Macmillan Press: London.

INTERNET

Wening Undasworo. 2009. "Politik pluralis Perancis" diakses dari http:/www.weningw@yahoo.com pada 04 oktober 2013

"Le tourisme international en France en 2007".
Diakses dari http://www.insee.fr/en/ffc/pop_age4.htm pada 01 oktober 2013

"*The Steady Integration of France's Most Recent and Largest Minority*", dalam "*Muslim In France*", hal "*Employement Based Permanent Immigration examining the value of a skills-Based Point system"*. U.S Government Printing Office.

Washington Office 2007 Greetings to the press from Interior minister Nicolas Sarkozy diakses dari

http://www.interior.gouv.fr/rubrlques/e/el le ministre/el3 discourse/2006 pada tanggal 23 November 2013.

RUU Imigrasi Perancis 18 Mei, 2006 diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/05/060518_immigrationbill.shtml Pada 09 Desember 2013

Perancis Punya Presiden Baru, *Kompas*, 7 Mei 2007